

Teori dan Model Analisis Kebijakan Pendidikan

Wildan Fathoni, Imam Wahyudi Nasution, Muhammad Yusup, Nur Asiah, Amirudin

Universitas Islam Batanghari (UNISBA) Indonesia,

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 19, 2025

Revised June 21, 2025

Accepted June 28, 2025

Available online July 10, 2025

Kata kunci:

Analisis Kebijakan Pendidikan,
Pendidikan Islam, Teori Manajemen
Pendidikan, Model Kebijakan,
Pendekatan Kritis.

Keywords:

Educational Policy Analysis, Islamic
Education, Educational Management
Theory, Policy Models, Critical Approach..



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan
Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini membahas teori dan model analisis kebijakan pendidikan dengan fokus pada relevansinya dalam konteks pendidikan nasional dan pendidikan Islam di Indonesia. Kajian ini mengulas berbagai teori manajemen pendidikan, seperti teori sistem, teori kontingensi, dan teori perubahan, untuk memahami dinamika dan kompleksitas pengelolaan lembaga pendidikan. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi model-model analisis kebijakan pendidikan, seperti model rasional, model sistem, dan model CIPP, serta mengadopsi pendekatan kritis guna mengidentifikasi asumsi, kepentingan, dan dampak kebijakan terhadap kelompok masyarakat yang beragam. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji data primer dan sekunder dari berbagai sumber terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori manajemen sangat penting dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan agar mampu menciptakan generasi yang beriman, bertakwa, dan siap menghadapi tantangan zaman. Studi kasus kebijakan pendidikan di Indonesia memperlihatkan perlunya pendekatan multidimensional dan partisipatif untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan berkualitas.

ABSTRACT

This study discusses theories and models of educational policy analysis with a focus on their relevance in the context of national education and Islamic education in Indonesia. The review covers various educational management theories, such as systems theory, contingency theory, and change theory, to understand the dynamics and complexity of educational institution management. In addition, this research explores models of educational policy analysis, including the rational model, systems model, and CIPP model, and adopts a critical approach to identify assumptions, interests, and the impact of policies on diverse community groups. The method used is library research with a qualitative approach, analyzing primary and secondary data from various reliable sources. The results show that management theory is essential in formulating, implementing, and evaluating educational policies to create a generation that is faithful, pious, and prepared to face contemporary challenges. Case studies of educational policy in Indonesia highlight the need for a multidimensional and participatory approach to realize an educational system that is fair, inclusive, and of high quality.

PENDAHULUAN

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta penjelasannya Bab II Pasal 3 menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Undang-Undang SISDIKNAS, 2003)

Tujuan pendidikan diatas sejalan dengan tujuan pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia menjadi manusia yang bertaqwa dan menghambakan diri kepada Allah SWT. (Muhktar et al., 2018) Menghambakan diri yang dimaksudkan ialah beribadah kepada Allah. Islam Menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah. Tujuan hidup manusia yang ditegaskan dalam Al- Qur' an surat Az-Zariyat sebagai berikut:

(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦) (الدَّرَجَاتُ/51:56)

Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. (Az-Zariyat/51:56) (Depag RI, 2005)

Menurut Profesor Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah Jilid XIII halaman 356, surat Az-Zariyat ayat 56 menjelaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Ayat ini menegaskan kembali perintah Allah pada ayat sebelumnya yang mengajak manusia untuk berlari

dan bersegera menuju Allah. Alasan mengapa manusia harus berlari dan bersegera kepada Allah dijelaskan dalam ayat ini, yaitu karena Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk memperoleh keuntungan atau manfaat bagi diri-Nya sendiri. Allah Maha Kaya dan Maha Kuasa sehingga tidak membutuhkan pengabdian makhluk-Nya. Sebaliknya, tujuan penciptaan ini adalah agar jin dan manusia beribadah kepada-Nya. Ibadah tersebut bukan sekadar kewajiban, melainkan juga merupakan kebutuhan dan sumber kebahagiaan bagi jin dan manusia. Ibadah dalam konteks ini dipahami sebagai ketundukan dan ketaatan yang lahir dari rasa keagungan terhadap Allah, yang menjadi inti dari makna keberadaan manusia dan jin di dunia. (Shihab, 2002)

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa tujuan pendidikan Islam sangatlah jelas, yaitu membentuk manusia yang bertaqwa dan menghambakan diri kepada Allah SWT melalui ibadah. Pendidikan bukan hanya sekadar transfer ilmu, tetapi proses pembentukan karakter dan spiritual yang menjadikan manusia sadar akan tujuan hidupnya sesuai dengan firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Dengan memahami bahwa manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah, pendidikan harus diarahkan agar peserta didik mampu menginternalisasi nilai-nilai ketundukan dan ketaatan kepada Allah sebagai kebutuhan dan sumber kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, pendidikan Islam berperan penting dalam membimbing manusia untuk menjalankan fungsi sebagai hamba yang taat sekaligus khalifah di muka bumi, sehingga hidupnya bermakna dan selaras dengan tujuan penciptaannya.

Jika dikaitkan dengan pendapat Zakiyah Daradjat bahwa tujuan umum pendidikan Islam itu menjadikan manusia sebagai insan kamil dengan cara takwa kepada Allah SWT. Orang yang bertakwa dalam bentuk insan kamil masih perlu mendapatkan pendidikan untuk pengembangan diri dan penyempurnaan, setidaknya agar bisa memelihara kesempurnaannya supaya tidak luntur atau berkurang. Selanjutnya Zakiyah Daradjat menyampaikan tujuan akhir pendidikan Islam dalam firman Allah SWT Al-Qur' an Surat Ali Imran ayat 102 sebagai berikut: (Daradjat et al., 2008)

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ١٠٢) (آل عمران/3: 102)

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. (Ali 'Imran/3:102). (Depag RI, 2005)

Menurut Profesor Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah Jilid II halaman 168, surat Ali Imran ayat 102 ini menjelaskan emerintah orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan seluruh perintah-Nya dan menjauhi seluruh larangan-Nya hingga batas kemampuan maksimal. Ayat ini juga menegaskan agar setiap Muslim menjaga keislamannya hingga akhir hayat, sehingga tidak meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Menurut penafsiran sahabat Nabi seperti Abdullah bin Mas' ud, makna "sebenar-benar takwa" adalah menaati Allah tanpa pernah durhaka, selalu mengingat-Nya tanpa lupa, dan mensyukuri nikmat-Nya tanpa mengingkari. (Shihab, 2002)

Namun, para ulama menegaskan bahwa Allah tidak membebani manusia di luar kemampuannya. Karena itu, ayat ini dilengkapi dengan QS. at-Taghabun: 16 yang menegaskan agar bertakwa sesuai kesanggupan masing-masing. Dengan demikian, Ali Imran ayat 102 menjadi arahan agar setiap Muslim terus berusaha mencapai puncak takwa, sementara ayat at-Taghabun menjadi pedoman bahwa usaha takwa dilakukan sesuai kemampuan. Kedua ayat ini saling melengkapi: Ali Imran ayat 102 sebagai tujuan, dan at-Taghabun ayat 16 sebagai jalan yang harus ditempuh menuju tujuan tersebut. Pesan utamanya adalah agar setiap Muslim istiqamah di jalan takwa, menjaga keimanan hingga akhir hayat, dan selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah sesuai kemampuan masing-masing. (Shihab, 2002)

Berdasarkan penjelasan di atas, berpendapat bahwa tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 sangat selaras dengan tujuan pendidikan Islam yang menekankan pembentukan manusia bertaqwa dan beribadah kepada Allah SWT. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai transfer ilmu, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter dan spiritual yang menjadikan peserta didik sadar akan tujuan hidupnya sesuai dengan firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 dan Ali Imran ayat 102. Dengan demikian, pendidikan diarahkan untuk membentuk insan kamil yang mampu menginternalisasi nilai-nilai ketundukan, ketaatan, dan tanggung jawab sebagai hamba Allah sekaligus khalifah di muka bumi.

Kaitan dengan teori dan model analisis kebijakan pendidikan terletak pada perlunya pendekatan yang komprehensif dan multidimensional dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan. Analisis kebijakan pendidikan Islam, sebagaimana dijelaskan dalam literatur, mengintegrasikan aspek filosofis, yuridis, sosial, dan politis, serta nilai-nilai agama sebagai landasan normatif. Model-model analisis kebijakan seperti model rasional, sistem, normatif, dan deskriptif sangat relevan untuk memastikan kebijakan pendidikan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga sesuai dengan tujuan luhur pendidikan Islam.

Misalnya, model rasional dapat digunakan untuk merancang kebijakan yang secara sistematis mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan kamil, sementara model sistem membantu

memahami interaksi berbagai komponen pendidikan (kurikulum, guru, lingkungan) dalam mencapai tujuan tersebut. Pendekatan proses dan teori kelompok juga penting untuk mengakomodasi dinamika politik dan sosial dalam formulasi kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan dijalankan secara optimal.

Dengan demikian, teori dan model analisis kebijakan pendidikan menjadi alat penting untuk menjembatani tujuan ideal pendidikan nasional dan Islam dengan praktik kebijakan yang nyata, agar pendidikan dapat menciptakan generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Artikel ini memfokuskan diri pada analisis mendalam mengenai kebijakan pendidikan, khususnya dalam konteks Indonesia dan negara-negara Muslim. Mengingat luasnya cakupan kebijakan pendidikan, penelitian ini membatasi diri pada beberapa aspek kunci untuk mencapai kedalaman analisis yang memadai.

Pertama, penelitian ini akan mengkaji berbagai teori manajemen pendidikan yang relevan, seperti teori sistem, teori kontingensi, dan teori perubahan. Pemahaman terhadap teori-teori ini penting untuk menganalisis bagaimana kebijakan pendidikan dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam sistem yang kompleks.

Kedua, penelitian ini akan mengeksplorasi model-model analisis kebijakan pendidikan, termasuk model konteks, Input, Proses, Output, dan Outcome (CIPP). Model-model ini akan digunakan sebagai kerangka kerja untuk menganalisis efektivitas dan dampak kebijakan pendidikan dalam berbagai konteks.

Ketiga, penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kritis dalam menganalisis kebijakan pendidikan, menggali asumsi-asumsi yang mendasari kebijakan, mengidentifikasi kepentingan-kepentingan yang terlibat, dan mengevaluasi dampaknya terhadap kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Pendekatan kritis ini penting untuk mengungkap potensi bias dan ketidakadilan dalam kebijakan pendidikan.

Keempat, penelitian ini akan menyajikan studi kasus analisis kebijakan pendidikan di Indonesia. Studi kasus ini akan memberikan contoh konkret bagaimana teori dan model analisis kebijakan dapat diterapkan untuk memahami dan mengevaluasi kebijakan pendidikan dalam konteks yang berbeda. Pemilihan Indonesia memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai agama dan budaya mempengaruhi kebijakan pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode library research atau studi kepustakaan untuk mengeksplorasi secara mendalam teori dan model analisis kebijakan pendidikan. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang relevan dari berbagai sumber terpercaya.

Artikel ini menggunakan metode analisis kualitatif yang akan mengulas dan mendapatkan data-data dari berbagai sumber, baik dari data primer yaitu data-data utama yang dari subjek penelitian secara langsung, maupun sekunder (buku dan jurnal terkait) sehingga menghasilkan satu kesimpulan yang utuh. (Nasution, 2023)

Melalui metode library research yang komprehensif ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman teoritis dan praktis mengenai implementasi Sistem Informasi Manajemen yang efektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan layanan di lembaga pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Manajemen Pendidikan.

Teori Sistem

Teori sistem dalam konteks sekolah memandang sekolah sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berhubungan, seperti siswa, guru, kurikulum, fasilitas, dan lingkungan masyarakat. Menurut pandangan ini, keberhasilan sekolah bergantung pada kemampuan setiap komponen untuk berfungsi dengan baik dan bekerja sama secara sinergis. Penerapan teori sistem di sekolah melibatkan pendekatan holistik dalam manajemen, mempertimbangkan semua faktor yang berpengaruh pada hasil pendidikan, mengintegrasikan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat agar pendidikan relevan dan aplikatif, serta membangun jaringan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. (Sumual et al., 2024)

Teori sistem memandang sekolah atau lembaga pendidikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian atau elemen yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pendidikan, elemen-elemen tersebut meliputi peserta didik, tenaga pendidik, kurikulum, metode pembelajaran, sarana prasarana, dan lingkungan sosial. Teori ini menekankan

pentingnya pengelolaan yang holistik dan integratif, di mana perubahan atau masalah pada satu bagian akan memengaruhi bagian lain dalam sistem. Manfaat teori sistem dalam pendidikan antara lain:

- 1) Meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya
- 2) Memperbaiki kualitas pembelajaran melalui koordinasi antar elemen
- 3) Memudahkan perencanaan strategis dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan
- 4) Menyediakan mekanisme evaluasi dan umpan balik berkelanjutan

Namun, penerapan teori ini menghadapi tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan sumber daya.

Teori Kontingensi (Contingency Theory)

Menurut Imam Ma'arif teori kontingensi menyatakan bahwa tidak ada satu pendekatan manajemen yang cocok untuk semua situasi; manajemen harus disesuaikan dengan kondisi spesifik organisasi dan lingkungan. Teori ini sangat relevan dalam konteks manajemen sekolah tingkat kalangan atas dan bawah, di mana perbedaan sumber daya dan latar belakang sosial-ekonomi memerlukan strategi manajemen yang berbeda. Di sekolah kalangan atas, manajemen cenderung lebih fleksibel dan adaptif, memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis. Program-program sekolah disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa yang berasal dari keluarga dengan harapan tinggi terhadap pendidikan. (Ma'arif, 2024)

Menurut Satria dkk yang dikutip oleh Sumual et al., teori kontingensi berargumen bahwa tidak ada satu pendekatan manajemen yang bisa berlaku secara universal sebaliknya, manajemen harus disesuaikan dengan situasi spesifik. Dalam pendidikan, teori ini berarti bahwa manajemen sekolah harus fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, aplikasi di sekolah. (Sumual et al., 2024)

Teori kontingensi menekankan bahwa tidak ada satu cara manajemen yang paling baik untuk semua situasi. Keberhasilan manajemen tergantung pada kesesuaian antara gaya manajemen dan kondisi lingkungan atau situasi tertentu. Dalam pendidikan, teori ini mengajarkan bahwa kebijakan dan strategi manajemen harus disesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, budaya, dan sumber daya yang tersedia di sekolah atau lembaga pendidikan.

Misalnya, sekolah di lingkungan dengan sumber daya terbatas perlu menerapkan pendekatan manajemen yang adaptif dan kreatif agar tetap efektif, berbeda dengan sekolah yang memiliki fasilitas lengkap dan dukungan kuat. Teori ini membantu pengelola pendidikan untuk fleksibel dan responsif terhadap dinamika lingkungan.

Teori Perubahan (Change Theory)

Teori perubahan fokus pada proses bagaimana organisasi atau sistem pendidikan dapat melakukan transformasi atau inovasi untuk meningkatkan kinerja dan relevansi. Teori ini menyoroti pentingnya kepemimpinan yang visioner, komunikasi efektif, partisipasi semua pihak, serta manajemen resistensi terhadap perubahan.

Teori perubahan mengkedepankan bagaimana transformasi pada sistem atau prosen pendidikan untuk mencapai tujuan. Bersamaan dengan teori perubahan, teori kepemimpinan transformasional menekankan pentingnya peran pemimpin yang mampu menginspirasi dan memotivasi bawahannya untuk mencapai kinerja yang lebih unggul. Gaya kepemimpinan ini tidak hanya fokus pada pencapaian target jangka pendek, tetapi juga pada pengembangan individu serta inovasi dalam proses pendidikan. Di sekolah-sekolah kalangan atas, kepala sekolah sering berperan sebagai pemimpin transformasional yang mendorong staf untuk terus berinovasi, memperbaiki kurikulum, dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Pendekatan ini membantu sekolah-sekolah tersebut mempertahankan daya saing dan reputasi sebagai penyedia pendidikan berkualitas tinggi. (Sumual et al., 2024)

Dalam konteks pendidikan, teori perubahan digunakan untuk mengelola reformasi kurikulum, pengembangan profesional guru, dan penerapan teknologi baru. Teori ini membantu memastikan bahwa perubahan yang dilakukan dapat diterima dan berdampak positif pada kualitas pendidikan.

Ketiga teori manajemen pendidikan ini saling melengkapi dan dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan konteks lembaga pendidikan. Teori Sistem memberikan kerangka kerja holistik untuk memahami interaksi antar elemen pendidikan. Teori Kontingensi menekankan pentingnya penyesuaian strategi manajemen dengan kondisi spesifik. Teori Perubahan mendukung proses adaptasi dan inovasi dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Pemahaman dan penerapan teori-teori ini sangat penting dalam analisis dan perumusan kebijakan pendidikan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Ketiga teori manajemen pendidikan ini saling melengkapi dan dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan konteks lembaga pendidikan.

Model Perumusan Kebijakan Pendidikan

Menurut Stokey dan Zeckhuaser "A model is simplified representation of some aspect of the real world. Sometimes of an object, sometimes of a situation or a process. It may be an acyual physical

representation, a globe, for instance or a diagram, a concept, or even a set a question” . Jadi, model adalah representasi dari sebuah aspek dalam dunia nyata yang disederhanakan. Kadang-kadang model berupa objek, sebuah situasi atau proses. Namun, yang jelas model itu representasi fisik yang nyata. Seperti globe (bola dunia), diagram, sebuah konsep dan bahkan sederet pertanyaan. (Fatah, 2012)

Model Kelembagaan (institusionalisme)

Model kelembagaan berpendapat bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah, jadi apapun yang telah dibuat pemerintah, dengan cara apapun adalah kebijakan publik. Model ini mendasarkan kepada fungsi-fungsi kelembagaan dari pemerintah, di setiap sektor dan tingkat, di dalam perumusan kebijakan. Menurut Dye lembaga pemerintah memberikan kebijakan dengan tiga ciri utama yaitu (1) lembaga Negara itu memberikan pengesahan (legitimasi), (2) kebijakan Negara itu bersifat universal dalam arti bahwa hanya kebijakan-kebijakan negara yang dapat disebarluaskan, (3) hanya pemerintah yang memegang hak monopoli untuk memaksakan secara sah kebijakan kepada Masyarakat. (Aziz et al., 2020)

Model kelembagaan merupakan model yang disusun oleh lembaga pemerintah. Model ini bersifat tradisional karena dalam perumusan kebijakan tidak mengikutsertakan masyarakat atau stakeholder kebijakan itu sendiri. (Kholifah et al., 2024)

Model kelembagaan berprinsip bahwa pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh dalam pembuatan kebijakan. Semua kebijakan yang dihasilkan pemerintah dianggap sebagai kebijakan publik yang sah dan memiliki legitimasi dari lembaga negara. Kebijakan ini bersifat universal dan dapat dimonopoli serta dipaksakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, model kelembagaan sangat cocok diterapkan dalam perumusan kebijakan pendidikan di sektor pemerintahan, karena pemerintah memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan tersebut. Namun, model ini cenderung kurang memperhatikan hubungan antar lembaga dan substansi kebijakan secara mendalam. (Marsari et al., 2021)

Berdasarkan penjelasan tersebut, saya berpendapat bahwa model kelembagaan menekankan peran sentral pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk pendidikan. Model ini memastikan legitimasi dan kewenangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan. Namun, karena model ini kurang melibatkan masyarakat dan stakeholder, kebijakan yang dihasilkan mungkin kurang responsif terhadap kebutuhan lapangan. Oleh karena itu, perlu dipadukan dengan pendekatan partisipatif dan sistemik agar kebijakan pendidikan lebih efektif, inklusif, dan adaptif

Model sistem

Model sistem merupakan model yang berbeda dari model kelembagaan karena dalam perumusan kebijakan, model ini merangkul masyarakat, stakeholder kebijakan, serta pemerintah dalam perumusan kebijakan, dengan melihat situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. (Kholifah et al., 2024)

Suatu sistem harus mampu mengatur penyelesaian-penyelesaian pertentangan atau konflik dan memberlakukan penyelesaian-penyelesaian ini pada pihak yang bersangkutan, oleh karena suatu sistem dibangun berdasarkan elemen-elemen yang mendukung sistem tersebut dan hal ini bergantung pada interaksi antara berbagai subsistem, maka suatu sistem akan melindungi dirinya melalui tiga hal, yakni: 1) menghasilkan output yang secara layak memuaskan, 2) menyandarkan diri pada ikatan-ikatan yang berakar dalam sistem itu sendiri, dan 3) menggunakan atau mengancam untuk menggunakan kekuatan (penggunaan otoritas). (Aziz et al., 2020)

Berdasarkan penjelasan tersebut, saya berpendapat bahwa model sistem dalam analisis kebijakan pendidikan menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan dinamis dibandingkan model kelembagaan. Dengan melibatkan masyarakat, pemangku kepentingan, dan pemerintah secara bersama dalam proses perumusan kebijakan, model ini mampu menangani konflik dan pertentangan melalui interaksi antar subsistem yang saling mendukung. Keberhasilan suatu sistem kebijakan ditentukan oleh kemampuannya menghasilkan output yang memuaskan, memperkuat ikatan internal, dan menggunakan otoritas secara efektif. Pendekatan ini penting untuk menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kondisi nyata di lapangan dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial-politik.

Model Rasional

Model rasional adalah pendekatan dalam pembuatan kebijakan yang bertujuan menghasilkan manfaat sosial maksimal bagi masyarakat dengan menggunakan prosedur yang efisien dan ilmiah. Model ini berlandaskan pada prinsip rasionalisme dan positivisme, meyakini bahwa masalah dapat diselesaikan melalui analisis data lengkap dan logis. Namun, dalam praktiknya, keputusan publik seringkali tidak sepenuhnya optimal karena keterbatasan rasionalitas manusia dan informasi yang tersedia, sehingga kebijakan yang diambil hanya memenuhi kriteria pembuat kebijakan saja. (Marsari et al., 2021) Model rasional merupakan model perumusan kebijakan yang didasari oleh teori positifisme dan rasionalisme yakni perumusan kebijakan dengan cara mengumpulkan data-data yang valid kemudian di analisis, model ini menggunakan rasional dalam perumusan kebijakannya sesuai dengan masalah kebijakan yang dihadapi.

(Kholifah et al., 2024)

Berdasarkan penjelasan diatas model rasional dalam perumusan kebijakan, dengan landasan teori positivisme dan rasionalisme, menekankan penggunaan data valid dan analisis mendalam untuk memecahkan masalah. Meskipun idealnya menghasilkan kebijakan yang optimal, model ini seringkali terbentur pada keterbatasan rasionalitas pembuat kebijakan dan ketersediaan informasi yang lengkap. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa kebijakan yang dihasilkan mungkin lebih mencerminkan kriteria pembuat kebijakan daripada manfaat sosial yang maksimal.

Model Inkrimentalis

Model inkrimentalis merupakan model perumusan kebijakan dengan menganalisis kembali kekurangan kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Model kebijakan ini menawarkan model yang praktis karena hanya fokus kepada perbaikan ataupun pengembangan yang sudah ada, tidak membuat kebijakan baru dengan jangka waktu yang panjang. (Kholifah et al., 2024)

Landasan pokok rasional model ini adalah bahwa perubahan inkrimental memberikan tingkat maksimal keamanan dalam proses perubahan kebijakan. Semua pengetahuan yang bisa dipercaya didasarkan pada acara satu-satunya untuk mengambil keputusan tanpa menimbulkan resiko dengan melanjutkan kebijakan sesuai dengan arah tujuan kebijakan lama membatasi pertimbangan-pertimbangan kebijakan alternatif dengan kebijakan-kebijakan yang secara relatif mempunyai tingkat perbedaan yang kecil dengan kebijakan sekarang yang berlaku. (Aziz et al., 2020)

Model Penyelidikan Campuran

model penyelidikan campuran memiliki kelebihan yaitu melihat dari dua sisi utama dan khusus dalam merumuskan kebijakan sehingga kebijakan yang ditemukan lebih terperinci namun hal ini menjadi kelemahan karena pembidikan permasalahan tersebut hanya difokuskan kepada beberapa daerah saja sehingga banyak daerah yang akan luput dari pantuan. (Marsari et al., 2021) Model ini merupakan model yang menggabungkan antara model rasional dan inkrimentalis, model ini cocok digunakan dalam lingkup perumusan kebijakan yang luas dan kebijakan yang mencakup segala bidang, karena pada perumusan kebijakan dengan model ini melihat dari berbagai sisi baik itu yang bersifat rasional maupun inkrimentalis. (Aziz et al., 2020)

Model Proses

Model proses memiliki kelebihan yaitu kebijakan yang lahir merupakan bentuk kefokuskan terhadap elemen irasional perumus kebijakan dengan memperhatikan setiap kebutuhan masyarakat namun yang menjadi kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang lama hingga kebijakan dapat di sahkan. (Marsari et al., 2021) Model proses merupakan model perumusan kebijakan yang bersifat tertata karena dimulai dari proses identifikasi masalah, penyusunan program, perumusan rancangan kebijakan, persetujuan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Kelemahan pada model ini adalah cukup memakan waktu yang banyak dalam proses perumusan kebijakannya.

Model Teori Elit

Model teori elit merupakan model perumusan kebijakan yang dibentuk langsung oleh para kelompok elit termasuk ahli kebijakan, dan kelompok massa seperti masyarakat biasa hanya bisa menerima dan menjalankan kebijakan sesuai yang telah di sahkan. Teori elit menunjukkan bahwa kebanyakan rakyat itu apatis (tak memperhatikan, dan tidak peduli) dan kurang informasi tentang kebijakan publik. Kelompok elitlah yang sebenarnya membentuk opini massa tentang pertanyaan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan publik ternyata benar-benar menjadi preferensi atau keinginan yang dianggarkan para elit saja. (Qomaruzzaman, 2021)

Berdasarkan penjelasan tentang model teori elit, saya berpendapat bahwa model ini menggambarkan realitas bahwa kebijakan publik sering kali dikendalikan oleh kelompok elit yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar, sementara masyarakat umum cenderung pasif dan kurang informasi. Hal ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan kepentingan dan preferensi elit daripada aspirasi rakyat banyak. Meskipun model ini menjelaskan bagaimana kebijakan dapat terbentuk secara cepat dan terstruktur oleh para ahli dan penguasa, model elit juga menimbulkan kekhawatiran tentang kurangnya partisipasi masyarakat dan potensi ketimpangan dalam representasi kepentingan publik. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan mekanisme yang lebih inklusif agar kebijakan publik tidak hanya menjadi cerminan keinginan elit semata, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas.

Pendekatan Kritis dalam Menganalisis Kebijakan Pendidikan

Pendekatan kritis dalam menganalisis kebijakan pendidikan menekankan pentingnya melihat kebijakan tidak hanya dari aspek teknis atau administratif, tetapi juga dari perspektif sosial dan politik yang lebih luas. (Hasan, 2023)

Pendekatan ini mengajak kita untuk mengkaji bagaimana kebijakan pendidikan mencerminkan dan memengaruhi dinamika kekuasaan, ketidaksetaraan, dan kepentingan berbagai kelompok dalam

masyarakat. Dengan demikian, analisis kritis berfokus pada pengungkapan ideologi tersembunyi, ketidakadilan struktural, serta dampak kebijakan terhadap kelompok marginal atau kurang berdaya. (Rizkwanti & Caspari, 2024)

Pendekatan ini juga menuntut keterlibatan multidisipliner dan kolaboratif agar dapat memahami konteks sosial-politik yang kompleks serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Di Indonesia, pendekatan kritis penting untuk mengidentifikasi ketimpangan dalam akses dan mutu pendidikan, serta untuk mendorong reformasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan sosial dan ekonomi secara lebih menyeluruh. (Rosbianti et al., 2024)

Dengan demikian, analisis kebijakan pendidikan yang menggunakan pendekatan kritis tidak hanya menilai efektivitas kebijakan, tetapi juga mengkritisi struktur dan proses yang melatarbelakangi kebijakan tersebut demi terciptanya pendidikan yang lebih demokratis dan berkeadilan.

Analisis Kebijakan Pendidikan yang tetapkan di Indonesia

Analisis kebijakan adalah proses sistematis untuk mengkaji, merumuskan, dan memahami kebijakan publik, bertujuan memberikan rekomendasi berbasis informasi akurat tentang pilihan kebijakan dan konsekuensinya. Proses ini meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data, pengembangan alternatif, hingga penilaian hasil yang mungkin dicapai. Analisis kebijakan pendidikan di Indonesia penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, mengatasi masalah sosial-ekonomi, dan memperkuat pemerintahan. Melalui analisis ini, dapat dipahami keberhasilan kebijakan, dampaknya pada masyarakat, serta faktor-faktor yang memengaruhi penyusunan dan pelaksanaannya. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas kebijakan pendidikan di masa depan demi kemajuan pendidikan.

Berikut adalah analisis mengenai kebijakan yang telah ditetapkan di Indonesia yaitu: Kebijakan Pendidikan, contoh kebijakannya:

- Kartu Indonesia Pintar (KIP)
 - a) Tujuan: KIP bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin dengan memberikan bantuan biaya pendidikan.
 - b) Analisis: Kebijakan ini efektif dalam mendorong angka partisipasi pendidikan di kalangan anak-anak kurang mampu. Namun, masalah yang masih muncul adalah kualitas pendidikan yang tidak merata di berbagai daerah. Terdapat ketimpangan antara pendidikan di kota besar dan daerah terpencil, serta kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai di beberapa tempat.
 - c) Alternatif Solusi: Pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dengan peningkatan fasilitas, pelatihan guru, dan penerapan teknologi pendidikan di daerah terpencil. (Dahyanti et al., 2025)
- Kesenjangan Antara Kebijakan dan Implementasi dalam Sektor Pendidikan

Kesenjangan kebijakan pendidikan dapat diartikan sebagai perbedaan antara visi, tujuan, atau sasaran yang tertuang dalam kebijakan pendidikan dengan hasil yang dicapai dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, program pemerintah seperti Wajib Belajar 12 Tahun bertujuan meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Namun, di beberapa daerah terpencil, kebijakan ini sulit terealisasi akibat berbagai hambatan, seperti kurangnya fasilitas sekolah, minimnya tenaga pendidik berkualitas, atau kondisi geografis yang sulit dijangkau.

Kesenjangan antara kebijakan dan implementasi dalam pendidikan memiliki dampak yang signifikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan:

- a) Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan: Anak-anak di daerah terpencil sering kali tidak mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak di perkotaan.
- b) Rendahnya Literasi dan Kompetensi: Kurangnya implementasi kebijakan yang efektif dapat berdampak pada rendahnya tingkat literasi, numerasi, dan keterampilan siswa.
- c) Tingginya Angka Putus Sekolah: Kegagalan dalam menyediakan fasilitas dan dukungan pendidikan yang memadai dapat memaksa siswa untuk berhenti sekolah, terutama di daerah miskin.
- d) Melemahnya Kepercayaan Publik: Ketika kebijakan pendidikan tidak memberikan dampak nyata, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah

Salah satu faktor utama yang memengaruhi kualitas pendidikan adalah kompetensi guru. Guru yang berkualitas memiliki kemampuan pedagogis, profesionalisme, dan keahlian di bidangnya yang memadai. Menurut penelitian yang dilakukan oleh UNESCO, pelatihan guru yang berkelanjutan dapat meningkatkan efektivitas pengajaran dan hasil belajar siswa. Kurangnya pelatihan bagi guru sering kali menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil. Faktor-faktor tersebut meliputi kompetensi guru, infrastruktur, kurikulum, keterlibatan masyarakat, dan kebijakan pendidikan. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia memerlukan pendekatan menyeluruh

yang melibatkan semua pemangku kepentingan. (Dahyanti et al., 2025)

Berdasarkan analisis diatas analisis kebijakan pendidikan merupakan proses penting yang sistematis untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Contohnya, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) berhasil meningkatkan partisipasi pendidikan bagi anak kurang mampu, namun masih menghadapi tantangan ketimpangan kualitas antar daerah. Selain itu, kesenjangan antara kebijakan dan implementasi, seperti dalam program Wajib Belajar 12 Tahun, menunjukkan perlunya perhatian lebih pada faktor-faktor seperti kompetensi guru, infrastruktur, dan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, upaya perbaikan pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh dan inklusif agar kebijakan dapat memberikan dampak nyata bagi kemajuan pendidikan nasional.

SIMPULAN

Pendidikan nasional di Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu menjadi warga negara yang cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab. Tujuan ini sejalan dengan nilai-nilai pendidikan Islam yang menekankan pentingnya ibadah, ketundukan, dan ketaatan kepada Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur' an surat Az-Zariyat ayat 56 dan Ali Imran ayat 102. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter dan spiritual yang mendalam, sehingga peserta didik mampu memahami dan menjalankan tujuan hidupnya secara utuh, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah di muka bumi.

Dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, analisis kebijakan pendidikan di Indonesia memanfaatkan berbagai teori dan model manajemen pendidikan, seperti teori sistem, teori kontingensi, dan teori perubahan. Teori sistem memandang sekolah sebagai satu kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi, sementara teori kontingensi menekankan pentingnya penyesuaian strategi manajemen dengan kondisi spesifik setiap sekolah. Teori perubahan dan kepemimpinan transformasional mendorong inovasi, pengembangan diri, serta adaptasi terhadap tantangan zaman. Selain itu, model-model analisis kebijakan seperti CIPP (Context, Input, Process, Product) serta pendekatan kritis digunakan untuk mengevaluasi efektivitas, keadilan, dan dampak kebijakan pendidikan, baik dari sisi teknis maupun sosial.

Artikel ini menegaskan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan multidimensional dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama, aspek filosofis, sosial, dan politik, serta menggunakan metode analisis yang tepat, kebijakan pendidikan diharapkan mampu menjawab tantangan nyata di masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Hasil analisis kebijakan yang mendalam tidak hanya memberikan solusi praktis, tetapi juga menjadi landasan untuk menciptakan generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta siap berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara.

REFERENSI

- Abdul Fattah Nasution. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Harfa Creative.
- Bambang Qomaruzzaman. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam. Bandung: MPM.
- H. Muhktar, dkk. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan (Standar Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah/Madrasah). Jambi: Salim Media Indonesia.
- Nanang Fatah. (2012). Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Zakiah Daradjat, dkk. (2008). Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tafsir dan Kajian Al-Qur' an:
- M. Quraish Shihab. (2002). Tafsir al-Misbah (Jilid II). Jakarta: Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab. (2002). Tafsir al-Misbah (Jilid XIII). Jakarta: Lentera Hati.
- Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. (2005). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: Syamsil Al-Qur'an.
- Aziz, A. A., et al. (2020). Model analisis kebijakan pendidikan. Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah, 4(2), 192-201.
- Dahyanti, N., et al. (2025). Analisis kebijakan dalam mengatasi problematika pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam, 2(1), 87-100.
- Hasan, D. (2023). Analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan: Perspektif sosial dan politik. Literacy Notes, 1(2), 5.
- Kholifah, E. R., et al. (2024). Model perumusan kebijakan pendidikan. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan,

- 7(2), 1399-1404.
- Ma'arif, I. (2024). Konsep dan teori manajemen pendidikan sekolah tingkat kalangan atas dan kalangan bawah. *Journal Innovation In Education*, 2(4), 197-209.
- Marsari, H., Hairani, S., & Gistituati, N. (2021). Model perumusan kebijakan pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 89-94.
- Rizkwanti, R. A. K. D., & Caspari, A. (2024). Pendekatan studi kritis dan relevansinya terhadap kebijakan publik. *The Critical Studies Approach and Its Relevance to Public Policy*, 49.
- Rosbianti, R., Indriyati, I., & Nurlaila, N. (2024). Analisis kritis kebijakan tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang SD/MI. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar dan Menengah*, 1(2), 112-122.
- Sumual, S. D. M., et al. (2024). Teori manajemen pendidikan: Suatu analisis konseptual dan aplikasinya di sekolah. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 353-360.